DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi Rianto,*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Chomzah, H. Ali Achmad, *Hukum Pertanahan*, *Seri Hukum Pertanahan III dan IV*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002).

HadikusumaHilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum,* (Bandung, Mandar Maju, 1995).

Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013).

Harsono Budi, *Hukum Agraria Indonesia Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria* (Jakarta : Djambatan, 2003).

Harsono Budi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*(Jakarta : Djambatan, 2008).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005).

Purnomo, R. Serfianto Dibyo, *Panduan Lengkap Pengurusan Dokumen Properti*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).

R. Soepranto, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003).

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum*, (jakarta: UI Press, 1982).

Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985).

Soemardjono , Maria S. W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2001).

Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodelogi Penulisan hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).*

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta:Rhineka Cipta, 1991).

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997).

Syah, Mudakir Iskandar, *Dasar-dasar Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Jakarta : Jala Permata, 2007).

Jurnal

Budhayati , Christiana Tri, *Kriteria Kepentingan Umum dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan di Indonesia*, (jurnal ilmu hukum, Vol. 5, April 2012).

M. Madalina, *Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di tinjau dari teori Hukum Pembangunan*, (Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Vol. 12, 5 Juni 2015).

Internet

http://berita.suaramerdeka.com/penyelesaian-underpass-terancam-molor/ diakses pada 2 Februari 2016

http://berita.suaramerdeka.com/rencana-underpass-jatingaleh-pembebasan-lahan-60M/, diakses pada 2 februari 2016

http://berita.suaramerdeka.com/rencana-underpass-jatingaleh-pembebasan-lahan-60M/, Selasa, 2 februari 2016

http://wikipedia.edu/com, diakses pada 12 februari 2016

http://www.bphn.go.id/data/documents/04pdkotasemarang007.pdf

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar NRI 1945.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.